



**MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 300.2.2 – 2138 TAHUN 2025
TENTANG**

**PEMBERIAN DAN PEMUTAKHIRAN KODE, DATA WILAYAH ADMINISTRASI
PEMERINTAHAN, DAN PULAU**

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah selesainya pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah serentak secara nasional Tahun 2024 sejalan dengan berakhirnya moratorium pemberian dan pemutakhiran kode dan data wilayah administrasi pemerintahan kecamatan, kelurahan dan desa sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1-1/8000/SJ tanggal 9 November 2022, maka perlu dilakukan penyesuaian lebih lanjut;
- b. bahwa penyesuaian lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dalam pemberian dan pemutakhiran kode, data wilayah administrasi pemerintahan dan pulau, untuk tertib administrasi dan regulasi, maka Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau, sudah tidak sesuai dengan perkembangan sehingga perlu dilakukan pencabutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6614);
8. Peraturan Presiden Nomor 149 Tahun 2024 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1433);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEMBERIAN DAN PEMUTAKHIRAN KODE, DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, DAN PULAU.

KESATU : Menetapkan pemberian dan pemutakhiran kode, data wilayah administrasi pemerintahan, dan pulau yang selanjutnya disebut kode, data wilayah administrasi pemerintahan, dan pulau terdiri dari:

- a. rekapitulasi kode, data wilayah administrasi pemerintahan dan pulau per provinsi seluruh Indonesia, yang berisi:
 - 1) kode provinsi;
 - 2) nama provinsi;
 - 3) jumlah kabupaten, kota, kecamatan, kelurahan dan desa;
 - 4) luas wilayah;
 - 5) jumlah penduduk; dan
 - 6) jumlah pulau.
- b. rincian kode dan data wilayah administrasi pemerintahan kabupaten/kota per provinsi seluruh Indonesia, yang berisi:
 - 1) kode kabupaten/kota;
 - 2) nama kabupaten/kota;

- 3) jumlah kecamatan, kelurahan dan desa per kabupaten/kota;
 - 4) luas wilayah kabupaten/kota; dan
 - 5) jumlah penduduk per kabupaten/kota.
- c. rincian kode dan data wilayah administrasi pemerintahan kecamatan pada kabupaten/kota per provinsi seluruh Indonesia, yang berisi:
1. kode kecamatan;
 2. nama kecamatan;
 3. nama ibu kota provinsi dan kabupaten/kota;
 4. jumlah kabupaten, kota, kecamatan, kelurahan dan desa;
 5. luas wilayah provinsi dan kabupaten/kota; dan
 6. jumlah penduduk provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan.
- d. rekapitulasi dan rincian kode dan data pulau seluruh Indonesia, yang berisi:
- 1) kode pulau;
 - 2) nama pulau;
 - 3) jumlah pulau;
 - 4) koordinat pulau;
 - 5) luas pulau;
 - 6) berpenduduk (BP) atau tidak berpenduduk (TBP); dan
 - 7) keterangan.
- e. rekapitulasi jumlah penduduk seluruh Indonesia, yang berisi:
- 1) jumlah penduduk laki-laki per provinsi dan kabupaten/kota;
 - 2) jumlah penduduk perempuan per provinsi dan kabupaten/kota; dan
 - 3) jumlah penduduk total seluruh Indonesia.

KEDUA : Rekapitulasi kode, data wilayah administrasi pemerintahan dan pulau per provinsi seluruh Indonesia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU huruf a tercantum dalam Lampiran huruf A;

KETIGA : Rincian kode dan data wilayah administrasi pemerintahan kabupaten/kota per provinsi seluruh Indonesia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU huruf b, pada:

- a. Provinsi Aceh
- 1) Kabupaten Aceh Selatan
 - 2) Kabupaten Aceh Tenggara
 - 3) Kabupaten Aceh Timur
 - 4) Kabupaten Aceh Tengah
 - 5) Kabupaten Aceh Barat
 - 6) Kabupaten Aceh Besar
 - 7) Kabupaten Pidie
 - 8) Kabupaten Aceh Utara
 - 9) Kabupaten Simeulue
 - 10) Kabupaten Aceh Singkil
 - 11) Kabupaten Bireuen
 - 12) Kabupaten Aceh Barat Daya
 - 13) Kabupaten Gayo Lues
 - 14) Kabupaten Aceh Jaya
 - 15) Kabupaten Nagan Raya
 - 16) Kabupaten Aceh Tamiang

- 17) Kabupaten Bener Meriah
- 18) Kabupaten Pidie Jaya
- 19) Kota Banda Aceh
- 20) Kota Sabang
- 21) Kota Lhokseumawe
- 22) Kota Langsa
- 23) Kota Subulussalam
- b. Provinsi Sumatera Utara
 - 1) Kabupaten Tapanuli Tengah
 - 2) Kabupaten Tapanuli Utara
 - 3) Kabupaten Tapanuli Selatan
 - 4) Kabupaten Nias
 - 5) Kabupaten Langkat
 - 6) Kabupaten Karo
 - 7) Kabupaten Deli Serdang
 - 8) Kabupaten Simalungun
 - 9) Kabupaten Asahan
 - 10) Kabupaten Labuhanbatu
 - 11) Kabupaten Dairi
 - 12) Kabupaten Toba
 - 13) Kabupaten Mandailing Natal
 - 14) Kabupaten Nias Selatan
 - 15) Kabupaten Pakpak Bharat
 - 16) Kabupaten Humbang Hasundutan
 - 17) Kabupaten Samosir
 - 18) Kabupaten Serdang Bedagai
 - 19) Kabupaten Batu Bara
 - 20) Kabupaten Padang Lawas Utara
 - 21) Kabupaten Padang Lawas
 - 22) Kabupaten Labuhanbatu Selatan
 - 23) Kabupaten Labuhanbatu Utara
 - 24) Kabupaten Nias Utara
 - 25) Kabupaten Nias Barat
 - 26) Kota Medan
 - 27) Kota Pematangsiantar
 - 28) Kota Sibolga
 - 29) Kota Tanjungbalai
 - 30) Kota Binjai
 - 31) Kota Tebing Tinggi
 - 32) Kota Padangsidimpuan
 - 33) Kota Gunungsitoli
- c. Provinsi Sumatera Barat
 - 1) Kabupaten Pesisir Selatan
 - 2) Kabupaten Solok
 - 3) Kabupaten Sijunjung
 - 4) Kabupaten Tanah Datar
 - 5) Kabupaten Padang Pariaman
 - 6) Kabupaten Agam
 - 7) Kabupaten Lima Puluh Kota
 - 8) Kabupaten Pasaman
 - 9) Kabupaten Kepulauan Mentawai

- 10) Kabupaten Dharmasraya
- 11) Kabupaten Solok Selatan
- 12) Kabupaten Pasaman Barat
- 13) Kota Padang
- 14) Kota Solok
- 15) Kota Sawahlunto
- 16) Kota Padang Panjang
- 17) Kota Bukittinggi
- 18) Kota Payakumbuh
- 19) Kota Pariaman
- d. Provinsi Riau
 - 1) Kabupaten Kampar
 - 2) Kabupaten Indragiri Hulu
 - 3) Kabupaten Bengkalis
 - 4) Kabupaten Indragiri Hilir
 - 5) Kabupaten Pelalawan
 - 6) Kabupaten Rokan Hulu
 - 7) Kabupaten Rokan Hilir
 - 8) Kabupaten Siak
 - 9) Kabupaten Kuantan Singingi
 - 10) Kabupaten Kepulauan Meranti
 - 11) Kota Pekanbaru
 - 12) Kota Dumai
- e. Provinsi Jambi
 - 1) Kabupaten Kerinci
 - 2) Kabupaten Merangin
 - 3) Kabupaten Sarolangun
 - 4) Kabupaten Batanghari
 - 5) Kabupaten Muaro Jambi
 - 6) Kabupaten Tanjung Jabung Barat
 - 7) Kabupaten Tanjung Jabung Timur
 - 8) Kabupaten Bungo
 - 9) Kabupaten Tebo
 - 10) Kota Jambi
 - 11) Kota Sungai Penuh
- f. Provinsi Sumatera Selatan
 - 1) Kabupaten Ogan Komering Ulu
 - 2) Kabupaten Ogan Komering Ilir
 - 3) Kabupaten Muara Enim
 - 4) Kabupaten Lahat
 - 5) Kabupaten Musi Rawas
 - 6) Kabupaten Musi Banyuasin
 - 7) Kabupaten Banyuasin
 - 8) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
 - 9) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
 - 10) Kabupaten Ogan Ilir
 - 11) Kabupaten Empat Lawang
 - 12) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
 - 13) Kabupaten Musi Rawas Utara
 - 14) Kota Palembang
 - 15) Kota Pagar Alam

- 16) Kota Lubuk Linggau
- 17) Kota Prabumulih
- g. Provinsi Bengkulu
 - 1) Kabupaten Bengkulu Selatan
 - 2) Kabupaten Rejang Lebong
 - 3) Kabupaten Bengkulu Utara
 - 4) Kabupaten Kaur
 - 5) Kabupaten Seluma
 - 6) Kabupaten Mukomuko
 - 7) Kabupaten Lebong
 - 8) Kabupaten Kepahiang
 - 9) Kabupaten Bengkulu Tengah
 - 10) Kota Bengkulu
- h. Provinsi Lampung
 - 1) Kabupaten Lampung Selatan
 - 2) Kabupaten Lampung Tengah
 - 3) Kabupaten Lampung Utara
 - 4) Kabupaten Lampung Barat
 - 5) Kabupaten Tulang Bawang
 - 6) Kabupaten Tanggamus
 - 7) Kabupaten Lampung Timur
 - 8) Kabupaten Way Kanan
 - 9) Kabupaten Pesawaran
 - 10) Kabupaten Pringsewu
 - 11) Kabupaten Mesuji
 - 12) Kabupaten Tulang Bawang Barat
 - 13) Kabupaten Pesisir Barat
 - 14) Kota Bandar Lampung
 - 15) Kota Metro
- i. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
 - 1) Kabupaten Bangka
 - 2) Kabupaten Belitung
 - 3) Kabupaten Bangka Selatan
 - 4) Kabupaten Bangka Tengah
 - 5) Kabupaten Bangka Barat
 - 6) Kabupaten Belitung Timur
 - 7) Kota Pangkal Pinang
- j. Provinsi Kepulauan Riau
 - 1) Kabupaten Bintan
 - 2) Kabupaten Karimun
 - 3) Kabupaten Natuna
 - 4) Kabupaten Lingga
 - 5) Kabupaten Kepulauan Anambas
 - 6) Kota Batam
 - 7) Kota Tanjung Pinang
- k. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
 - 1) Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
 - 2) Kota Administrasi Jakarta Pusat
 - 3) Kota Administrasi Jakarta Utara

- 4) Kota Administrasi Jakarta Barat
- 5) Kota Administrasi Jakarta Selatan
- 6) Kota Administrasi Jakarta Timur
- l. Provinsi Jawa Barat
 - 1) Kabupaten Bogor
 - 2) Kabupaten Sukabumi
 - 3) Kabupaten Cianjur
 - 4) Kabupaten Bandung
 - 5) Kabupaten Garut
 - 6) Kabupaten Tasikmalaya
 - 7) Kabupaten Ciamis
 - 8) Kabupaten Kuningan
 - 9) Kabupaten Cirebon
 - 10) Kabupaten Majalengka
 - 11) Kabupaten Sumedang
 - 12) Kabupaten Indramayu
 - 13) Kabupaten Subang
 - 14) Kabupaten Purwakarta
 - 15) Kabupaten Karawang
 - 16) Kabupaten Bekasi
 - 17) Kabupaten Bandung Barat
 - 18) Kabupaten Pangandaran
 - 19) Kota Bogor
 - 20) Kota Sukabumi
 - 21) Kota Bandung
 - 22) Kota Cirebon
 - 23) Kota Bekasi
 - 24) Kota Depok
 - 25) Kota Cimahi
 - 26) Kota Tasikmalaya
 - 27) Kota Banjar
- m. Provinsi Jawa Tengah
 - 1) Kabupaten Cilacap
 - 2) Kabupaten Banyumas
 - 3) Kabupaten Purbalingga
 - 4) Kabupaten Banjarnegara
 - 5) Kabupaten Kebumen
 - 6) Kabupaten Purworejo
 - 7) Kabupaten Wonosobo
 - 8) Kabupaten Magelang
 - 9) Kabupaten Boyolali
 - 10) Kabupaten Klaten
 - 11) Kabupaten Sukoharjo
 - 12) Kabupaten Wonogiri
 - 13) Kabupaten Karanganyar
 - 14) Kabupaten Sragen
 - 15) Kabupaten Grobogan
 - 16) Kabupaten Blora

- 17) Kabupaten Rembang
- 18) Kabupaten Pati
- 19) Kabupaten Kudus
- 20) Kabupaten Jepara
- 21) Kabupaten Demak
- 22) Kabupaten Semarang
- 23) Kabupaten Temanggung
- 24) Kabupaten Kendal
- 25) Kabupaten Batang
- 26) Kabupaten Pekalongan
- 27) Kabupaten Pemalang
- 28) Kabupaten Tegal
- 29) Kabupaten Brebes
- 30) Kota Magelang
- 31) Kota Surakarta
- 32) Kota Salatiga
- 33) Kota Semarang
- 34) Kota Pekalongan
- 35) Kota Tegal
- n. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
 - 1) Kabupaten Kulon Progo
 - 2) Kabupaten Bantul
 - 3) Kabupaten Gunungkidul
 - 4) Kabupaten Sleman
 - 5) Kota Yogyakarta
- o. Provinsi Jawa Timur
 - 1) Kabupaten Pacitan
 - 2) Kabupaten Ponorogo
 - 3) Kabupaten Trenggalek
 - 4) Kabupaten Tulungagung
 - 5) Kabupaten Blitar
 - 6) Kabupaten Kediri
 - 7) Kabupaten Malang
 - 8) Kabupaten Lumajang
 - 9) Kabupaten Jember
 - 10) Kabupaten Banyuwangi
 - 11) Kabupaten Bondowoso
 - 12) Kabupaten Situbondo
 - 13) Kabupaten Probolinggo
 - 14) Kabupaten Pasuruan
 - 15) Kabupaten Sidoarjo
 - 16) Kabupaten Mojokerto
 - 17) Kabupaten Jombang
 - 18) Kabupaten Nganjuk
 - 19) Kabupaten Madiun
 - 20) Kabupaten Magetan
 - 21) Kabupaten Ngawi
 - 22) Kabupaten Bojonegoro

- 23) Kabupaten Tuban
- 24) Kabupaten Lamongan
- 25) Kabupaten Gresik
- 26) Kabupaten Bangkalan
- 27) Kabupaten Sampang
- 28) Kabupaten Pamekasan
- 29) Kabupaten Sumenep
- 30) Kota Kediri
- 31) Kota Blitar
- 32) Kota Malang
- 33) Kota Probolinggo
- 34) Kota Pasuruan
- 35) Kota Mojokerto
- 36) Kota Madiun
- 37) Kota Surabaya
- 38) Kota Batu
- p. Provinsi Banten
 - 1) Kabupaten Pandeglang
 - 2) Kabupaten Lebak
 - 3) Kabupaten Tangerang
 - 4) Kabupaten Serang
 - 5) Kota Tangerang
 - 6) Kota Cilegon
 - 7) Kota Serang
 - 8) Kota Tangerang Selatan
- q. Provinsi Bali
 - 1) Kabupaten Jembrana
 - 2) Kabupaten Tabanan
 - 3) Kabupaten Badung
 - 4) Kabupaten Gianyar
 - 5) Kabupaten Klungkung
 - 6) Kabupaten Bangli
 - 7) Kabupaten Karangasem
 - 8) Kabupaten Buleleng
 - 9) Kota Denpasar
- r. Provinsi Nusa Tenggara Barat
 - 1) Kabupaten Lombok Barat
 - 2) Kabupaten Lombok Tengah
 - 3) Kabupaten Lombok Timur
 - 4) Kabupaten Sumbawa
 - 5) Kabupaten Dompu
 - 6) Kabupaten Bima
 - 7) Kabupaten Sumbawa Barat
 - 8) Kabupaten Lombok Utara
 - 9) Kota Mataram
 - 10) Kota Bima
- s. Provinsi Nusa Tenggara Timur
 - 1) Kabupaten Kupang

- 2) Kabupaten Timor Tengah Selatan
- 3) Kabupaten Timor Tengah Utara
- 4) Kabupaten Belu
- 5) Kabupaten Alor
- 6) Kabupaten Flores Timur
- 7) Kabupaten Sikka
- 8) Kabupaten Ende
- 9) Kabupaten Ngada
- 10) Kabupaten Manggarai
- 11) Kabupaten Sumba Timur
- 12) Kabupaten Sumba Barat
- 13) Kabupaten Lembata
- 14) Kabupaten Rote Ndao
- 15) Kabupaten Manggarai Barat
- 16) Kabupaten Nagekeo
- 17) Kabupaten Sumba Tengah
- 18) Kabupaten Sumba Barat Daya
- 19) Kabupaten Manggarai Timur
- 20) Kabupaten Sabu Raijua
- 21) Kabupaten Malaka
- 22) Kota Kupang
- t. Provinsi Kalimantan Barat
 - 1) Kabupaten Sambas
 - 2) Kabupaten Mempawah
 - 3) Kabupaten Sanggau
 - 4) Kabupaten Ketapang
 - 5) Kabupaten Sintang
 - 6) Kabupaten Kapuas Hulu
 - 7) Kabupaten Bengkayang
 - 8) Kabupaten Landak
 - 9) Kabupaten Sekadau
 - 10) Kabupaten Melawi
 - 11) Kabupaten Kayong Utara
 - 12) Kabupaten Kubu Raya
 - 13) Kota Pontianak
 - 14) Kota Singkawang
- u. Provinsi Kalimantan Tengah
 - 1) Kabupaten Kotawaringin Barat
 - 2) Kabupaten Kotawaringin Timur
 - 3) Kabupaten Kapuas
 - 4) Kabupaten Barito Selatan
 - 5) Kabupaten Barito Utara
 - 6) Kabupaten Katingan
 - 7) Kabupaten Seruyan
 - 8) Kabupaten Sukamara
 - 9) Kabupaten Lamandau
 - 10) Kabupaten Gunung Mas
 - 11) Kabupaten Pulang Pisau

- 12) Kabupaten Murung Raya
- 13) Kabupaten Barito Timur
- 14) Kota Palangkaraya
- v. Provinsi Kalimantan Selatan
 - 1) Kabupaten Tanah Laut
 - 2) Kabupaten Kotabaru
 - 3) Kabupaten Banjar
 - 4) Kabupaten Barito Kuala
 - 5) Kabupaten Tapin
 - 6) Kabupaten Hulu Sungai Selatan
 - 7) Kabupaten Hulu Sungai Tengah
 - 8) Kabupaten Hulu Sungai Utara
 - 9) Kabupaten Tabalong
 - 10) Kabupaten Tanah Bumbu
 - 11) Kabupaten Balangan
 - 12) Kota Banjarmasin
 - 13) Kota Banjarbaru
- w. Provinsi Kalimantan Timur
 - 1) Kabupaten Paser
 - 2) Kabupaten Kutai Kartanegara
 - 3) Kabupaten Berau
 - 4) Kabupaten Kutai Barat
 - 5) Kabupaten Kutai Timur
 - 6) Kabupaten Penajam Paser Utara
 - 7) Kabupaten Mahakam Ulu
 - 8) Kota Balikpapan
 - 9) Kota Samarinda
 - 10) Kota Bontang
- x. Provinsi Kalimantan Utara
 - 1) Kabupaten Bulungan
 - 2) Kabupaten Malinau
 - 3) Kabupaten Nunukan
 - 4) Kabupaten Tana Tidung
 - 5) Kota Tarakan
- y. Provinsi Sulawesi Utara
 - 1) Kabupaten Bolaang Mongondow
 - 2) Kabupaten Minahasa
 - 3) Kabupaten Kepulauan Sangihe
 - 4) Kabupaten Kepulauan Talaud
 - 5) Kabupaten Minahasa Selatan
 - 6) Kabupaten Minahasa Utara
 - 7) Kabupaten Minahasa Tenggara
 - 8) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
 - 9) Kabupaten Kep. Siau Tagulandang Biaro
 - 10) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
 - 11) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
 - 12) Kota Manado
 - 13) Kota Bitung

- 14) Kota Tomohon
- 15) Kota Kotamobagu
- z. Provinsi Sulawesi Tengah
 - 1) Kabupaten Banggai
 - 2) Kabupaten Poso
 - 3) Kabupaten Donggala
 - 4) Kabupaten Toli-Toli
 - 5) Kabupaten Buol
 - 6) Kabupaten Morowali
 - 7) Kabupaten Banggai Kepulauan
 - 8) Kabupaten Parigi Moutong
 - 9) Kabupaten Tojo Una Una
 - 10) Kabupaten Sigi
 - 11) Kabupaten Banggai Laut
 - 12) Kabupaten Morowali Utara
 - 13) Kota Palu
- aa. Provinsi Sulawesi Selatan
 - 1) Kabupaten Kepulauan Selayar
 - 2) Kabupaten Bulukumba
 - 3) Kabupaten Bantaeng
 - 4) Kabupaten Jeneponto
 - 5) Kabupaten Takalar
 - 6) Kabupaten Gowa
 - 7) Kabupaten Sinjai
 - 8) Kabupaten Bone
 - 9) Kabupaten Maros
 - 10) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
 - 11) Kabupaten Barru
 - 12) Kabupaten Soppeng
 - 13) Kabupaten Wajo
 - 14) Kabupaten Sidenreng Rappang
 - 15) Kabupaten Pinrang
 - 16) Kabupaten Enrekang
 - 17) Kabupaten Luwu
 - 18) Kabupaten Tana Toraja
 - 19) Kabupaten Luwu Utara
 - 20) Kabupaten Luwu Timur
 - 21) Kabupaten Toraja Utara
 - 22) Kota Makassar
 - 23) Kota Parepare
 - 24) Kota Palopo
- bb. Provinsi Sulawesi Tenggara
 - 1) Kabupaten Kolaka
 - 2) Kabupaten Konawe
 - 3) Kabupaten Muna
 - 4) Kabupaten Buton
 - 5) Kabupaten Konawe Selatan
 - 6) Kabupaten Bombana

- 7) Kabupaten Wakatobi
 - 8) Kabupaten Kolaka Utara
 - 9) Kabupaten Konawe Utara
 - 10) Kabupaten Buton Utara
 - 11) Kabupaten Kolaka Timur
 - 12) Kabupaten Konawe Kepulauan
 - 13) Kabupaten Muna Barat
 - 14) Kabupaten Buton Tengah
 - 15) Kabupaten Buton Selatan
 - 16) Kota Kendari
 - 17) Kota Bau Bau
- cc. Provinsi Gorontalo
- 1) Kabupaten Gorontalo
 - 2) Kabupaten Boalemo
 - 3) Kabupaten Bone Bolango
 - 4) Kabupaten Pahuwato
 - 5) Kabupaten Gorontalo Utara
 - 6) Kota Gorontalo
- dd. Provinsi Sulawesi Barat
- 1) Kabupaten Pasangkayu
 - 2) Kabupaten Mamuju
 - 3) Kabupaten Mamasa
 - 4) Kabupaten Polewali Mandar
 - 5) Kabupaten Majene
 - 6) Kabupaten Mamuju Tengah
- ee. Provinsi Maluku
- 1) Kabupaten Maluku Tengah
 - 2) Kabupaten Maluku Tenggara
 - 3) Kabupaten Kepulauan Tanimbar
 - 4) Kabupaten Buru
 - 5) Kabupaten Seram Bagian Timur
 - 6) Kabupaten Seram Bagian Barat
 - 7) Kabupaten Kepulauan Aru
 - 8) Kabupaten Maluku Barat Daya
 - 9) Kabupaten Buru Selatan
 - 10) Kota Ambon
 - 11) Kota Tual
- ff. Provinsi Maluku Utara
- 1) Kabupaten Halmahera Barat
 - 2) Kabupaten Halmahera Tengah
 - 3) Kabupaten Halmahera Utara
 - 4) Kabupaten Halmahera Selatan
 - 5) Kabupaten Kepulauan Sula
 - 6) Kabupaten Halmahera Timur
 - 7) Kabupaten Pulau Morotai
 - 8) Kabupaten Pulau Taliabu
 - 9) Kota Ternate
 - 10) Kota Tidore Kepulauan

gg. Provinsi Papua

- 1) Kabupaten Jayapura
- 2) Kabupaten Kepulauan Yapen
- 3) Kabupaten Biak Numfor
- 4) Kabupaten Sarmi
- 5) Kabupaten Keerom
- 6) Kabupaten Waropen
- 7) Kabupaten Supiori
- 8) Kabupaten Mamberamo Raya
- 9) Kota Jayapura

hh. Provinsi Papua Barat

- 1) Kabupaten Manokwari
- 2) Kabupaten Fak Fak
- 3) Kabupaten Teluk Bintuni
- 4) Kabupaten Teluk Wondama
- 5) Kabupaten Kaimana
- 6) Kabupaten Manokwari Selatan
- 7) Kabupaten Pegunungan Arfak

ii. Provinsi Papua Selatan

- 1) Kabupaten Merauke
- 2) Kabupaten Boven Digoel
- 3) Kabupaten Mappi
- 4) Kabupaten Asmat

jj. Provinsi Papua Tengah

- 1) Kabupaten Nabire
- 2) Kabupaten Puncak Jaya
- 3) Kabupaten Paniai
- 4) Kabupaten Mimika
- 5) Kabupaten Puncak
- 6) Kabupaten Dogiyai
- 7) Kabupaten Intan Jaya
- 8) Kabupaten Deiyai

kk. Provinsi Papua Pegunungan

- 1) Kabupaten Jayawijaya
- 2) Kabupaten Pegunungan Bintang
- 3) Kabupaten Yahukimo
- 4) Kabupaten Tolikara
- 5) Kabupaten Mamberamo Tengah
- 6) Kabupaten Yalimo
- 7) Kabupaten Lanny Jaya
- 8) Kabupaten Nduga

ll. Provinsi Papua Barat Daya

- 1) Kabupaten Sorong
- 2) Kabupaten Sorong Selatan
- 3) Kabupaten Raja Ampat
- 4) Kabupaten Tambrau
- 5) Kabupaten Maybrat
- 6) Kota Sorong

tercantum dalam Lampiran huruf B.

- KEEMPAT : Rincian kode dan data wilayah administrasi pemerintahan kecamatan pada kabupaten/kota per provinsi seluruh Indonesia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU huruf c tercantum dalam Lampiran huruf C;
- KELIMA : Rekapitulasi dan rincian kode dan data pulau seluruh Indonesia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU huruf d:
D.a. rekapitulasi jumlah pulau per provinsi seluruh Indonesia;
D.b. rekapitulasi jumlah pulau per kabupaten/kota per provinsi seluruh Indonesia; dan
D.c. rincian kode dan data pulau per kabupaten/kota per provinsi seluruh Indonesia,
tercantum dalam Lampiran huruf D.
- KEENAM : Rekapitulasi jumlah penduduk seluruh Indonesia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU huruf e, tercantum dalam Lampiran huruf E.
- KETUJUH : Pada saat Keputusan Menteri Dalam Negeri ini berlaku, maka Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum

Asmawa, AP., M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP 197410151993111003

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 25 April 2025
MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Tembusan Yth:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan;
4. Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasayarakatan;
5. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
6. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
7. Menteri Sekretaris Negara;
8. Menteri Keuangan;
9. Menteri Kesehatan;
10. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
11. Menteri Pertanian;
12. Menteri Kelautan dan Perikanan;
13. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal;
14. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
15. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
16. Sekretaris Kabinet;
17. Kepala Staf Kepresidenan;
18. Kepala Badan Informasi Geospasial;
19. Kepala Badan Pusat Statistik; dan
20. Ketua Komisi Pemilihan Umum.